

**ANALISIS SPASIAL KONSEKUENSI EKONOMI
AKIBAT KEJADIAN KEJAHATAN DI
INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas
Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**TARINA PALOKOTO
NIM. 12020114120049**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2018

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Tarina Palokoto
Nomor Induk Mahasiswa : 12020114120049
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS SPASIAL KONSEKUENSI
EKONOMI AKIBAT KEJADIAN
KEJAHATAN DI INDONESIA**
Dosen Pembimbing : Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si.

Semarang, 30 November 2018

Dosen Pembimbing,



(Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si.)

NIP. 197107251997022001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Tarina Palokoto
Nomor Induk Mahasiswa : 12020114120049
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS SPASIAL KONSEKUENSI
EKONOMI AKIBAT KEJADIAN
KEJAHATAN DI INDONESIA**
Dosen Pembimbing : Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si.

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 13 Desember 2018

Tim Penguji :

1. Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si. (.....)
2. Dr. Nugroho SBM, M.Si. (.....)
3. Drs. Y. Bagio Mudakir, M.T. (.....)

Mengetahui,
Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan


Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt.
NIP. 19670809 199203 1001

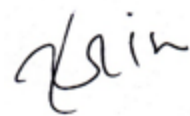
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Tarina Palokoto, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **ANALISIS SPASIAL KONSEKUENSI EKONOMI AKIBAT KEJADIAN KEJAHATAN DI INDONESIA**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 30 November 2018

Yang membuat pernyataan,



(Tarina Palokoto)

NIM : 12020114120049

ABSTRACT

Crime has an impact on people's decisions in carrying out activities, one of them is economic activity. This study aims to analyze the influence of several crime typologies (total crime; fraud, embezzlement, and corruption; and murder) and non-crime variables (labor, local government expenditure, life expectancy, domestic investment and foreign investment) on per capita GRDP in Indonesia and identify the existence of spatial dependencies of per capita GRDP in Indonesia.

The study used cross section data, namely 32 provinces in Indonesia in 2016 with the Spatial Lag Model (SLM) method. The spatial weighting used is queen contiguity, which is to pay attention to the intersection of the sides and angles of the region.

The results show that there is a negative spatial autocorrelation in per capita GRDP in Indonesia. Murder and labor affect GRDP per capita negatively and significantly. On the other hand, fraud, embezzlement, and corruption; local government expenditure, life expectancy, domestic investment, and foreign investment have a positive and significant influence on per capita GRDP. Meanwhile, total crime in general does not show its effect on per capita GRDP.

Keywords : Total Crime; Fraud, Embezzlement, and Corruption; Murder; per Capita GRDP; Spatial Dependency

ABSTRAK

Kejahatan memberikan dampak kepada keputusan masyarakat dalam melakukan kegiatan, salah satunya kegiatan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari beberapa tipologi kejahatan (jumlah kejahatan; kejahatan penipuan/perbuatan curang, penggelapan, dan korupsi; serta kejahatan pembunuhan) dan variabel-variabel nonkejahatan (tenaga kerja, pengeluaran pemerintah daerah, angka harapan hidup, penanaman modal dalam negeri, dan penanaman modal asing) terhadap PDRB per kapita di Indonesia serta mengidentifikasi adanya dependensi spasial dari PDRB per kapita di Indonesia.

Penelitian menggunakan data cross section, yakni 32 provinsi di Indonesia pada tahun 2016 dengan metode *Spatial Lag Model* (SLM). Pembobot spasial yang digunakan adalah *queen contiguity*, yaitu memperhatikan persinggungan sisi dan sudut wilayah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi spasial negatif pada PDRB per kapita di Indonesia. Variabel kejahatan pembunuhan dan tenaga kerja mempengaruhi PDRB per kapita secara negatif dan signifikan. Di sisi lain, variabel kejahatan penipuan/perbuatan curang, penggelapan, dan korupsi; pengeluaran pemerintah daerah, angka harapan hidup, penanaman modal dalam negeri, serta penanaman modal asing memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita. Sedangkan, jumlah kejahatan secara umum tidak menunjukkan pengaruhnya terhadap PDRB per kapita.

Kata kunci : Jumlah Kejahatan; Kejahatan Penipuan/Perbuatan Curang, Penggelapan, dan Korupsi; Kejahatan Pembunuhan; PDRB per Kapita; Dependensi Spasial

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Spasial Konsekuensi Ekonomi Akibat Kejadian Kejahatan di Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S-1 Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini, atas doa, dukungan, dan bimbingan yang telah diberikan. Ucapan terima kasih tersebut terutama penulis tujukan kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Akhmad Syakir Kurnia, S.E, M.Si., Ph.D., selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
4. Bapak Drs. Edy Yusuf Agung Gunanto, M.Sc. Ph.D., selaku dosen wali, yang telah memberikan nasihat dan pengarahan kepada penulis selama menempuh studi.

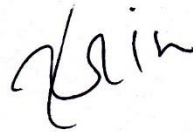
5. Ibu Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing, atas waktu, perhatian, dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Kedua orang tua, Ibu Erry Priyani dan Bapak Muswir Moeis, serta Mbak Alifia Palokoto dan Mas Toto Bachtiar Palokoto atas kasih sayang dan doa yang tidak pernah putus kepada penulis.
8. Teman-teman penulis, terutama Nine, Hapsari, Haevy, Anisa, Afnurul, Titin, Hima, Febby, Nurika, Nisa, Rizky, Ina, serta Dewi dan Via, juga Ardin, Ade, Ita, dan Kiki yang telah berbagi suka maupun duka, memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Seluruh teman-teman IESP angkatan 2014 atas pengalaman dan kebersamaan selama ini.
10. Keluarga besar EECC dan Tim KKN Desa Keji atas segala pelajaran dan pengalaman yang bermakna bagi penulis.
11. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu atas bantuan dan doa yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki

penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Semarang, 30 November 2018

Penulis,



(Tarina Palokoto)

NIM. 12020114120049

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	19
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	21
1.4 Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	25
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	25
2.1.1 Landasan Teori.....	25
2.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita.....	25
2.1.1.2 Kejahatan dan PDRB per Kapita.....	40
2.1.1.3 Tenaga Kerja dan PDRB per Kapita.....	49
2.1.1.4 Pengeluaran Pemerintah Daerah dan PDRB per Kapita.....	51
2.1.1.5 AHH dan PDRB per Kapita.....	52
2.1.1.6 Investasi dan PDRB per Kapita.....	54
2.1.1.7 Ekonomi Wilayah dan Penggunaan Alat Analisis Spasial.....	56
2.1.2 Penelitian Terdahulu.....	59
2.2 Kerangka Pemikiran.....	65
2.3 Hipotesis.....	67
BAB III METODE PENELITIAN.....	69
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	69
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	72
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	74
3.4 Metode Analisis.....	74
3.4.1 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik.....	76
3.4.1.1 Deteksi Normalitas.....	76
3.4.1.2 Deteksi Multikolinearitas.....	76
3.4.1.3 Deteksi Heteroskedastisitas.....	77
3.4.2 Regresi Linear Berganda.....	78

3.4.2.1 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F).....	79
3.4.2.2 Uji Hipotesis Secara Spasial (Uji t).....	80
3.4.2.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	83
3.4.3 Uji Autokorelasi Spasial (<i>Moran's I</i>).....	83
3.4.4 Pemilihan <i>Contiguity</i> untuk Matriks Pembobot Spasial.....	84
3.4.5 Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	86
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	88
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	88
4.1.1 Kondisi Geografis Indonesia.....	89
4.1.2 PDRB per Kapita di Indonesia.....	90
4.1.3 Kejahatan di Indonesia.....	92
4.1.4 Tenaga Kerja di Indonesia.....	98
4.1.5 Pengeluaran Pemerintah Daerah di Indonesia.....	100
4.1.6 Angka Harapan Hidup di Indonesia.....	102
4.1.7 Investasi di Indonesia.....	104
4.2 Analisis Data.....	106
4.2.1 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik.....	107
4.2.1.1 Deteksi Normalitas.....	107
4.2.1.2 Deteksi Multikolinearitas.....	108
4.2.1.3 Deteksi Heteroskedastisitas.....	109
4.2.2 Regresi Linear Berganda.....	111
4.2.2.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	112
4.2.2.2 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F).....	113
4.2.2.3 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t).....	114
4.2.3 Uji Autokorelasi Spasial.....	121
4.2.4 Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	121
4.2.5 <i>Spatial Lag Model</i>	123
4.2.6 Perbandingan Model Regresi Linear dan Model Regresi Spasial.....	127
4.3 Interpretasi Hasil.....	128
4.3.1 Jumlah Kejahatan.....	131
4.3.2 Kejahatan Penipuan/Perbuatan Curang, Penggelapan, dan Korupsi.....	132
4.3.3 Kejahatan Pembunuhan.....	133
4.3.4 Tenaga Kerja.....	134
4.3.5 Pengeluaran Pemerintah Daerah.....	134
4.3.6 Angka Harapan Hidup.....	135
4.3.7 Penanaman Modal Dalam Negeri.....	136
4.3.8 Penanaman Modal Asing.....	136
BAB V PENUTUP.....	138
5.1 Kesimpulan.....	138
5.2 Keterbatasan.....	141
5.3 Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA.....	145
LAMPIRAN.....	149

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2001-2016.....	11
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	62
Tabel 4.1 Pengeluaran Pemerintah Daerah Menurut Provinsi di Indonesia pada Tahun 2016 (dalam Jutaan Rupiah)	101
Tabel 4.2 Investasi Menurut Provinsi di Indonesia pada Tahun 2016	105
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	109
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	110
Tabel 4.5 Hasil Regresi Linear Berganda.....	111
Tabel 4.6 Hasil Uji Moran.....	121
Tabel 4.7 Hasil Uji LM	122
Tabel 4.8 Hasil Regresi SLM	123
Tabel 4.9 Nilai R ² dan AIC Metode OLS dan SLM.....	127

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Jumlah Kejahatan di Indonesia Tahun 2008-2016.....	2
Gambar 1.2 PDRB per Kapita di Indonesia Tahun 2016 (dalam Ribuan Rupiah) .	6
Gambar 1.3 Jumlah Kejahatan per 100.000 Penduduk di Indonesia Tahun 2016..	9
Gambar 1.4 Pengeluaran Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2010-2016 (dalam Ribuan Rupiah).....	14
Gambar 1.5 AHH Indonesia Tahun 2010-2016	15
Gambar 1.6 PMDN di Indonesia Tahun 2010-2016 (dalam Miliaran Rupiah)	16
Gambar 1.7 PMA di Indonesia Tahun 2010-2016 (dalam Jutaan US\$)	17
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	67
Gambar 3.1 <i>Roadmap</i> Pemodelan Regresi Spasial	75
Gambar 4.1 PDRB per Kapita Menurut Provinsi di Indonesia pada Tahun 2016 (dalam Ribuan Rupiah)	91
Gambar 4.2 Jumlah Kejahatan per 100.000 Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia pada Tahun 2016.....	93
Gambar 4.3 Kejahatan Penipuan/Perbuatan Curang, Penggelapan, dan Korupsi per 100.000 Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia pada Tahun 2016.....	95
Gambar 4.4 Kejahatan Pembunuhan per 100.000 Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia pada Tahun 2016.....	97
Gambar 4.5 Tenaga Kerja di Indonesia pada Tahun 2016.....	99
Gambar 4.6 AHH Menurut Provinsi di Indonesia pada Tahun 2016.....	103
Gambar 4.7 Hasil Uji Normalitas.....	108

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A Logaritma Natural Variabel	149
LAMPIRAN B Hasil Uji Autokorelasi Spasial	150
LAMPIRAN C Matriks Koefisien Varians	151

BAB I

PENDAHULUAN

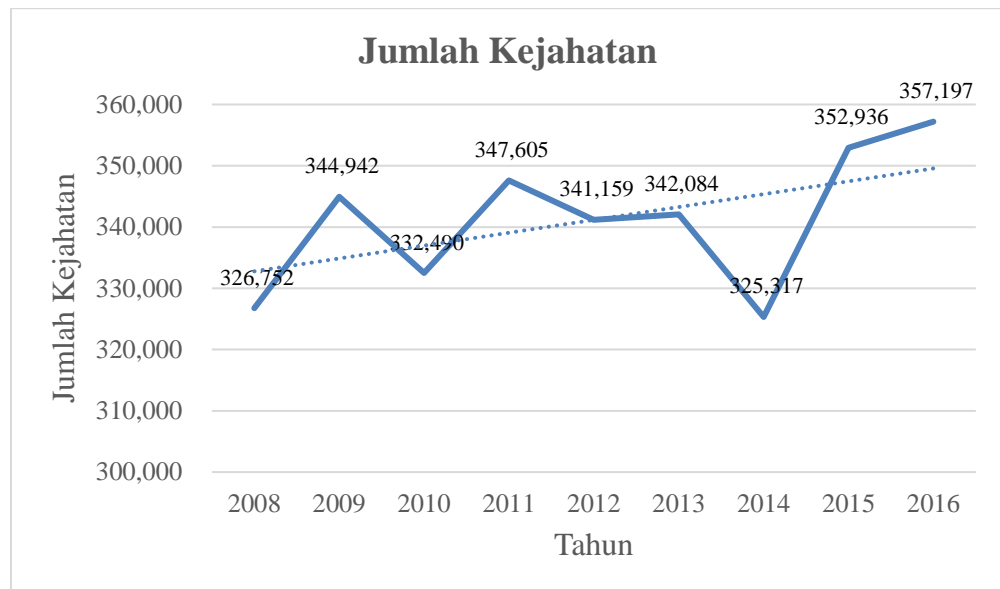
1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Akibat dari adanya kejahatan, masyarakat harus menganggung biaya yang seharusnya tidak mereka keluarkan. Beberapa akibat dari kejahatan tersebut antara lain: karena adanya kejadian kekerasan, maka harus dikeluarkan biaya untuk membayar biaya penyembuhan; dan penipuan/perbuatan curang, penggelapan, dan korupsi menyebabkan masyarakat kehilangan apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Karena kejahatan pula, masyarakat harus berpikir berulang kali dalam menentukan apa yang mereka akan lakukan, kenakan, gunakan, maupun kendarai; ke mana dan kapan saat yang tepat mereka akan pergi; serta di mana tempat yang seharusnya mereka tinggali untuk menghindari adanya risiko terkena tindak kejahatan.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang termasuk terbanyak di dunia. Berdasarkan data yang bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik), jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 258.704.986 jiwa pada tahun 2016. Dengan angka kepadatan penduduk sebesar 135,4 jiwa/km², negara ini mempunyai angka jumlah kejadian

kejahatan yang dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir ini cenderung selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Gambar 1.1. Jumlah Kejahatan di Indonesia Tahun 2008-2016 (dalam Satuan Kejadian Kejahatan)



Sumber: Statistik Kriminal dari berbagai tahun, diolah

Jumlah kejadian kejahatan di Indonesia pada tahun 2008-2016 mengalami fluktuasi seperti yang tergambar pada Gambar 1.1. Pada tahun 2009, jumlah kejahatan di Indonesia meningkat sebesar 18.190 kejadian, yakni dari sebanyak 326.752 kejadian di tahun 2008 menjadi sebanyak 344.942 di tahun 2009. Sementara di tahun 2010, angka kejadian kejahatan mengalami penurunan sebesar 12.452 kejadian, menjadi sebesar 332.490. Jumlah kejahatan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2011, menjadi sebesar 341.159 kejadian; kemudian angka tersebut kembali turun di tahun 2012 sebesar 6.446, sehingga jumlah kejahatan pada tahun tersebut menjadi 341.159 kejadian. Di tahun 2013, angka kejadian kejahatan kembali

meningkat mencapai 342.084, sebelum kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2014 menjadi sebesar 325.317. jumlah kejadian kejahatan di tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan total sebesar 31.880 kejadian dari tahun 2014, sehingga pada tahun 2016, jumlah kejadian kejahatan di Indonesia menjadi sebanyak 357.197 kejadian.

Walaupun di tahun 2010, 2012, dan 2014 sempat terjadi penurunan jumlah kejahatan, namun *trend* jumlah kejahatan di Indonesia dari tahun 2008 hingga 2016 cenderung meningkat. Sementara dalam sembilan tahun terakhir tersebut, jumlah kejahatan tertinggi di Indonesia terdapat pada tahun 2016.

Menurut Mauro dan Carmeci (2007), kejadian kejahatan dapat mengakibatkan kondisi ekonomi yang buruk secara terus-menerus. Selain itu, kejahatan dapat pula menyebabkan terjadinya jebakan kemiskinan (*poverty trap*) yang mengakibatkan perekonomian berada dalam dua ekuilibrium yang berbeda, yakni: ditandai dengan kejahatan yang tinggi dan produksi yang rendah; dan pendapatan yang tinggi dengan tingkat kejahatan yang rendah (Mehlum et al., 2005).

Teori Schumpeter menekankan pentingnya peranan pengusaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Para pengusaha merupakan golongan yang secara terus-menerus akan melakukan inovasi atau pembaharuan dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan inovasi tersebut akan memerlukan investasi baru. Investasi baru inilah yang diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi negara. Namun pada kenyataannya, salah

satu faktor non-ekonomi yang menentukan para investor untuk melakukan investasi adalah angka jumlah kejahatan di suatu wilayah. Iklim investasi yang kondusif merupakan salah satu hal yang menarik para investor. Wulansari (2017) menyatakan bahwa secara parsial, variabel pengangguran mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kriminalitas, dan distribusi pendapatan mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap kriminalitas; serta kriminalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah dibuka saluran baru bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Sjafrizal (2012), dalam era otonomi daerah, masing-masing daerah berlomba-lomba meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya guna mendorong perbaikan kemakmuran masyarakat setempat.

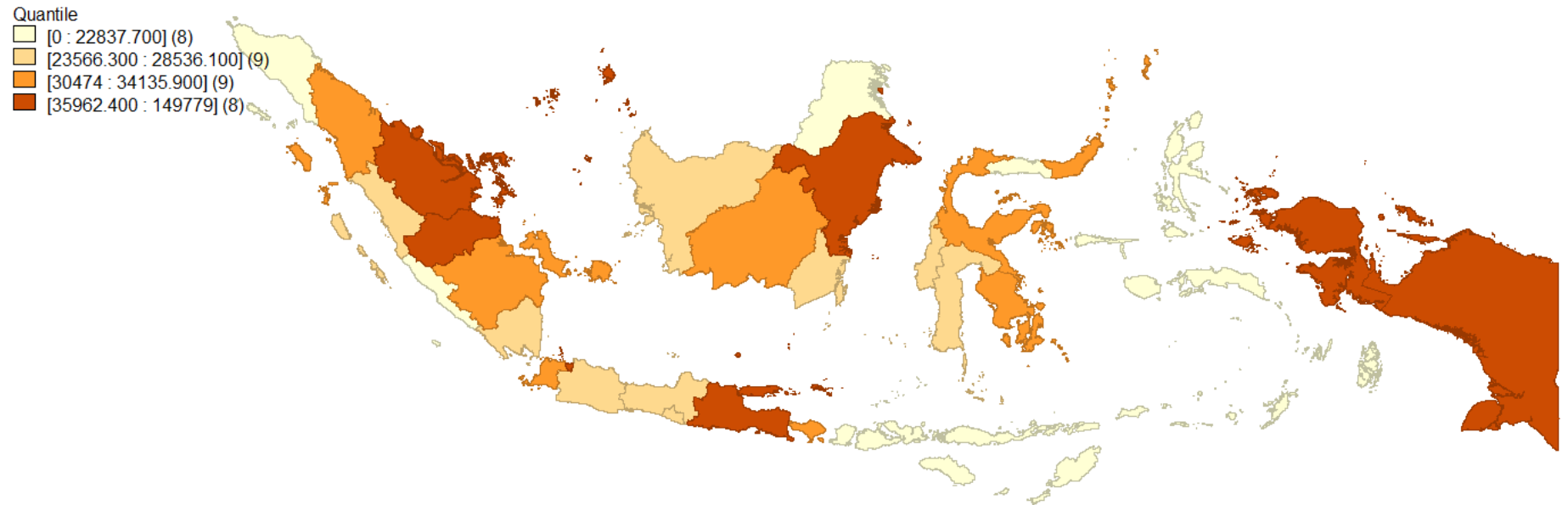
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), di mana dalam lingkup wilayah atau daerah (regional) digunakan sebutan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau

merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, dan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan per kapita merupakan PDRB atas dasar harga konstan yang dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Secara statistik, PDRB harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Sedangkan PDRB harga konstan per kapita berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Gambar 1.2 menampilkan *chloropleth map* dari PDRB per kapita di Indonesia pada tahun 2016. Peta tersebut menunjukkan rentang nilai PDRB atas dasar harga konstan per kapita dari masing-masing provinsi sesuai dengan warna yang diberikan. Sedangkan klasifikasi yang digunakan dalam peta tersebut adalah metode klasifikasi kuantil, di mana menggunakan prinsip pembagian anggota setiap kelas sama rata (Kurniati dan Rahardjo, 2015).

Gambar 1.2 PDRB Per Kapita di Indonesia Tahun 2016 (dalam Ribuan Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Terdapat delapan provinsi dengan PDRB per kapita tertinggi di Indonesia yang ditunjukkan dengan warna paling tua atau gelap. Tiga dari delapan provinsi tersebut terdapat di Pulau Sumatera, di mana sesuai dengan urutan PDRB per kapita tertinggi yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Riau, dan Jambi. Sedangkan dua provinsi terletak di Pulau Jawa, yakni Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur. Dua provinsi lainnya berada di Pulau Papua, yakni Provinsi Papua Barat dan Papua. Kemudian satu provinsi sisanya merupakan Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu PDRB per kapita tertinggi di Indonesia pada tahun 2016 dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp149.779.000,00.

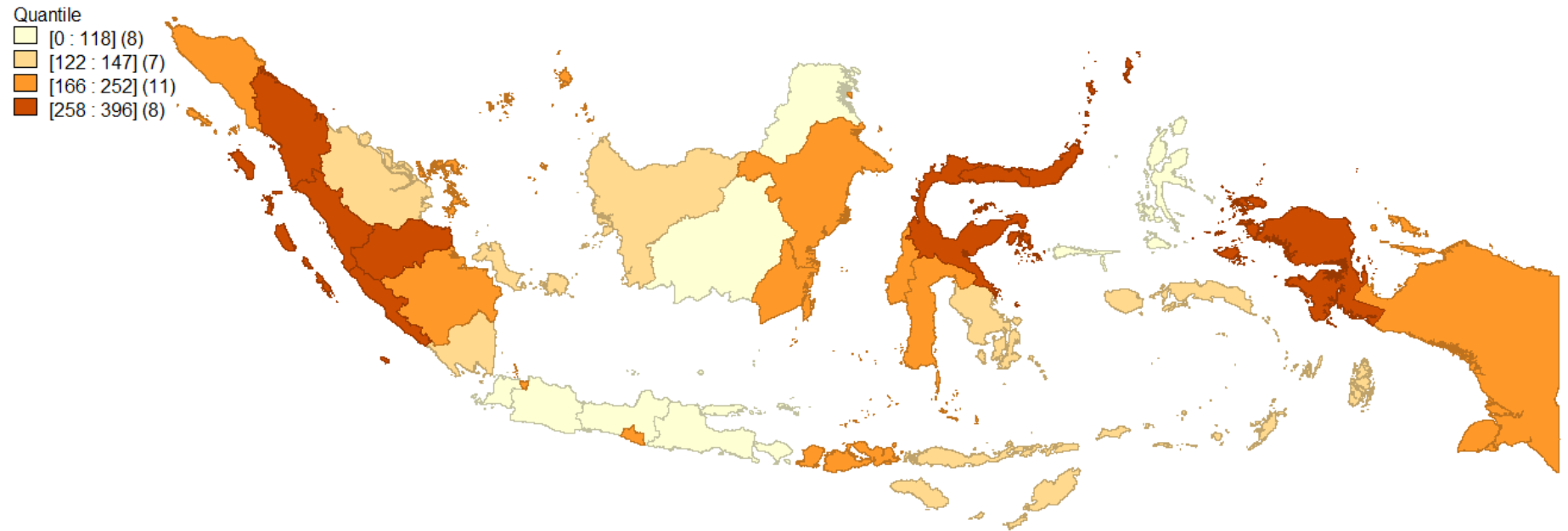
Sebaliknya, ditunjukkan oleh banyaknya warna yang paling muda atau cerah, provinsi dengan PDRB per kapita paling rendah di Indonesia adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni sejumlah Rp11.587.600,00. Dua provinsi dengan PDRB per kapita paling rendah setelah Nusa Tenggara Timur, yaitu Provinsi Maluku dan Maluku Utara, di mana masing-masing sejumlah Rp15.325.300,00 dan Rp18.177.000,00. Empat provinsi lainnya yang menunjukkan warna paling muda atau cerah, secara berurutan dari provinsi dengan PDRB per kapita paling rendah, yaitu Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Bengkulu, dan Aceh.

Angka jumlah kejahatan per 100.000 penduduk di Indonesia pada tahun 2016 ditampilkan dalam Gambar 1.3. Provinsi-provinsi yang terdapat pada Pulau Jawa terlihat memiliki warna muda atau cerah dalam gambar tersebut, yang mana menunjukkan bahwa angka jumlah kejahatan per 100.000 penduduk pada tahun 2016 di sebagian besar provinsi di Pulau Jawa termasuk yang terkecil. Provinsi-provinsi dengan angka jumlah kejahatan per 100.000 penduduk terkecil yang berada di Pulau Jawa, secara berurutan, adalah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain terdapat di Pulau Jawa, tiga provinsi lain yang menunjukkan warna

paling muda atau cerah, yaitu Provinsi Maluku Utara, Bali, dan Kalimantan Tengah. Di antara provinsi-provinsi yang telah disebutkan di atas, angka jumlah kejahatan paling kecil dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah dengan angka 39, kemudian secara berurutan diikuti oleh Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat dengan angka masing-masing 52 dan 68.

Di sisi lain, angka jumlah kejahatan per 100.000 penduduk yang terbesar, banyak di antaranya terdapat pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Dari delapan provinsi dengan angka terbesar, empat dari provinsi-provinsi tersebut terletak di Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Bengkulu, Sumatera Barat, Jambi, dan Sumatera Utara; dan tiga provinsi lainnya terletak di Pulau Sulawesi, yakni Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Selain itu, Provinsi Papua Barat juga merupakan salah satu dari provinsi-provinsi yang memiliki angka jumlah kejahatan per 100.000 penduduk yang terbesar di Indonesia. Tiga provinsi dengan angka jumlah kejahatan tertinggi Indonesia pada tahun 2016, diurutkan dari yang tertinggi, yaitu Provinsi Papua Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah, di mana masing-masing sejumlah 396, 343, dan 326.

Gambar 1.3 Jumlah Kejahatan per 100.000 Penduduk di Indonesia Tahun 2016



Sumber: Statistik Kriminal 2017, diolah

Indikator kejahatan yang diharapkan akan berpengaruh terhadap PDRB antara lain: jumlah kejahatan; kejahatan penipuan/perbuatan curang, penggelapan, dan korupsi; serta kejahatan pembunuhan. Penipuan/perbuatan curang, penggelapan, dan korupsi diasumsikan dapat mengurangi konsumsi dan investasi karena merealokasikan sumber daya dari kegiatan legal menjadi ilegal, serta dapat mengurangi ketidakpastian agen ekonomi. Namun di sisi lain, Beck dan Maher (1986) dan Lien (1986) (dalam Meon dan Sekkat, 2005) berpendapat bahwa kejahatan tersebut dapat meningkatkan efisiensi (biasa disebut dengan hipotesis “*grease the wheels*”) dikarenakan birokrasi yang tidak efisien. Sementara itu, pembunuhan dapat dianggap sebagai proksi dari tingkat kekerasan di suatu wilayah, karena kejahatan dengan kekerasan mengurangi kesediaan individu dan perusahaan untuk berinvestasi di wilayah-wilayah yang dianggap tidak aman (Carboni dan Detotto, 2014).

Selain indikator kejahatan di atas, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah daerah, angka harapan hidup, serta investasi juga diharapkan mempengaruhi nilai PDRB suatu daerah. Berdasarkan teori pertumbuhan neo-klasik, pertumbuhan ekonomi (pada tingkat provinsi menggunakan PDRB) dipengaruhi oleh perkembangan faktor-faktor produksi, yaitu: modal, tenaga kerja, dan teknologi (Sukirno, 2004).

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besaran PDRB per kapita di masing-masing provinsi di Indonesia. Angkatan kerja di suatu daerah merupakan bagian dari jumlah penduduk di daerah

tersebut. Todaro (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat justru mendorong timbulnya masalah keterbelakangan, sehingga tujuan pembangunan menjadi semakin sulit untuk dicapai. Meskipun demikian, jumlah penduduk yang besar tidak akan menjadi sebuah masalah apabila diiringi dengan semakin membaiknya tingkat pendidikan dari penduduk yang bersangkutan. Yang diharapkan dapat dicapai dari kondisi tersebut adalah meningkatnya PDRB per kapita di suatu daerah.

Tabel 1.1 Jumlah Tenaga Kerja di Indonesia

Tahun 2001-2016 (Orang)

Tahun	Tenaga Kerja
2001	90,807,417
2002	91,647,166
2003	92,810,791
2004	93,722,036
2005	93,958,387
2006	95,456,935
2007	99,930,217
2008	102,552,750
2009	104,870,663
2010	108,207,767
2011	107,416,309
2012	112,504,868
2013	112,761,072
2014	114,628,026
2015	114,819,199
2016	118,411,973

Sumber: Badan Pusat Statistik

Di sisi lain, tenaga kerja juga dapat berpengaruh negatif terhadap PDRB per kapita. Hal tersebut terjadi apabila tenaga kerja di suatu wilayah memutuskan untuk melakukan migrasi dan bekerja di wilayah lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Uno dan Kobayashi (2013), perpindahan yang dilakukan oleh tenaga kerja dengan kemampuan yang baik akan memberikan dampak negatif terhadap kondisi perekonomian wilayah yang ditinggalkan.

Tabel 1.1 memperlihatkan jumlah tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2001-2016. Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di Indonesia cenderung mengalami kenaikan pada periode waktu tersebut. Di tahun 2001, jumlah tenaga kerja di Indonesia adalah sebanyak 90.807.417 orang. Angka tersebut kemudian meningkat sebesar 839.749, yaitu tenaga kerja menjadi sebanyak 91.647.166 orang di tahun 2002. Jumlah tenaga kerja di Indonesia selanjutnya selalu mengalami kenaikan hingga tahun 2010. Pada tahun tersebut, tenaga kerja di Indonesia adalah sebanyak 108.207.767 orang. Namun di tahun 2011, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 791.458, sehingga jumlah tenaga kerja di Indonesia menjadi sebanyak 107.416.309 orang. Pada tahun berikutnya, angka tenaga kerja Indonesia mengalami kenaikan terbesar, yaitu sebanyak 5.088.559 orang. Sehingga, pada tahun 2012 jumlah tenaga kerja di Indonesia adalah sebanyak 112.504.868 orang. Jumlah tersebut terus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2016. Di tahun itu, jumlah tenaga kerja di Indonesia mencapai 118.411.973 orang.

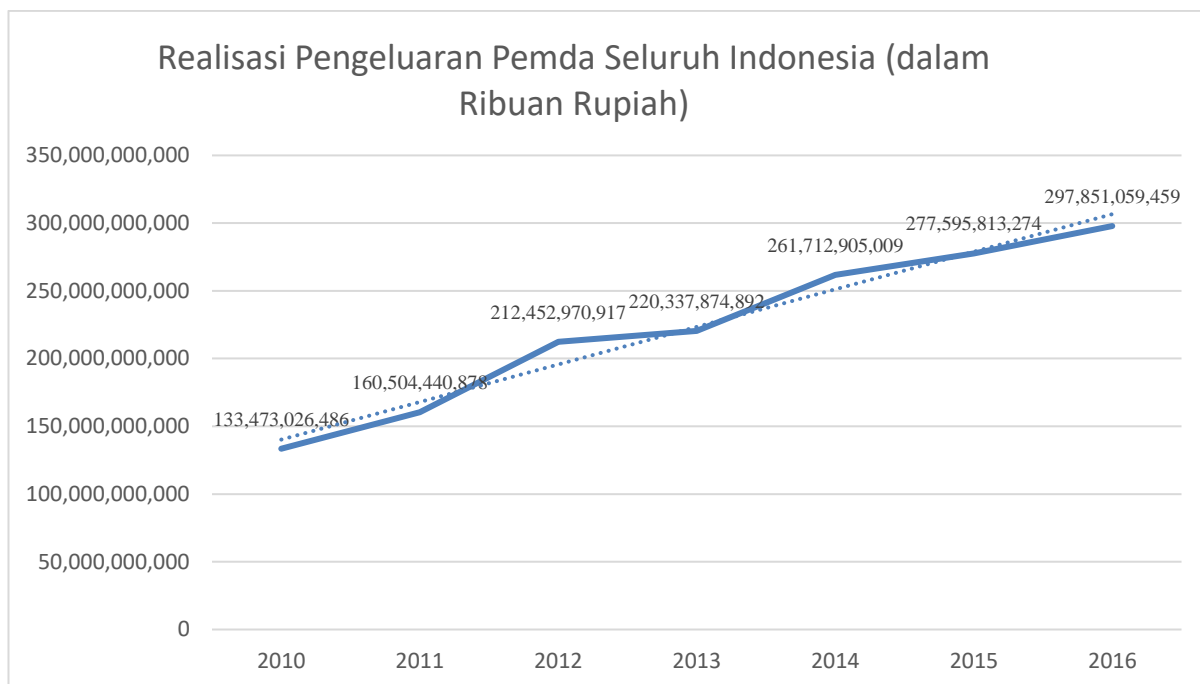
Nilai PDRB, sebagai indikator yang menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi di suatu daerah, juga dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah daerah yang bersangkutan. Jumlah pengeluaran pemerintah

daerah yang besar, apabila dapat dimanfaatkan secara optimal, diharapkan akan mampu mendorong perekonomian di daerah tersebut. Menurut Rustiono (2008), pengeluaran pemerintah yang besar akan menyebabkan semakin besarnya pula pendapatan daerah karena peningkatan permintaan agregat akan mendorong kenaikan investasi, sehingga produksi juga dapat meningkat.

Realisasi pengeluaran pemerintah daerah provinsi seluruh Indonesia pada tahun 2010-2016 ditampilkan dalam Gambar 1.4. Dalam gambar tersebut pengeluaran pemerintah daerah provinsi seluruh Indonesia selalu meningkat sejak tahun 2010 hingga 2016. Pada tahun 2010, pengeluaran pemerintah provinsi adalah sebesar Rp133.473.026.486.000,00. Angka tersebut kemudian mengalami peningkatan sebanyak Rp27.031.414.392.000,00 menjadi sebesar Rp160.504.440.878.000,00. Kenaikan pengeluaran pemerintah provinsi terbesar terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar Rp51.948.530.039.000,00. Sebaliknya, tahun 2013 merupakan tahun di mana peningkatan pengeluaran pemerintah provinsi seluruh Indonesia mengalami kenaikan terkecil, yakni sejumlah Rp7.884.903.975.000,00, menjadi sebesar Rp220.337.874.892.000,00. Pada tahun 2014, kenaikan pengeluaran pemerintah provinsi di Indonesia kembali menunjukkan angka yang cukup besar, yaitu Rp41.375.030.117.000,00, menjadi sebesar Rp261.712.905.009.000,00. Di tahun 2015, pengeluaran pemerintah provinsi mengalami kenaikan sebesar Rp15.882.908.265.000,00, dan pada tahun 2016, kenaikan pengeluaran

pemerintah provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp20.255.246.185.000,00, menjadi sejumlah Rp297.851.059.459.000,00.

Gambar 1.4 Pengeluaran Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2010-2016 (dalam Ribuan Rupiah)



Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2010-2013 dan 2014-2017

AHH (Angka Harapan Hidup) merupakan salah satu sektor yang berpengaruh terhadap PDRB suatu daerah. Menurut Wibisono (2001), angka harapan hidup memiliki efek positif pada tingkat pertumbuhan. Hal tersebut dikarenakan variabel ini juga merupakan proksi terhadap kondisi lain selain kondisi kesehatan yang merefleksikan keadaan yang diinginkan masyarakat.

Gambar 1.5 menunjukkan angka harapan hidup di Indonesia pada tahun 2010-2016. Angka harapan hidup terlihat selalu mengalami

peningkatan setiap tahunnya pada periode waktu tersebut. Pada tahun 2010, angka harapan hidup di Indonesia adalah selama 69,81 tahun. Angka tersebut juga meningkat di tahun 2011 menjadi selama 70,01 tahun. Di tahun-tahun selanjutnya, angka harapan hidup di Indonesia kembali mengalami kenaikan, meskipun angka kenaikan tersebut tidak begitu besar setiap tahunnya. Pada tahun 2012, angka harapan hidup Indonesia menunjukkan angka 70,2; kemudian masing-masing menunjukkan angka harapan hidup selama 70,4; 70,59 ;70,78 ; serta 70,9 tahun pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

Gambar 1.5 AHH Indonesia Tahun 2010-2016

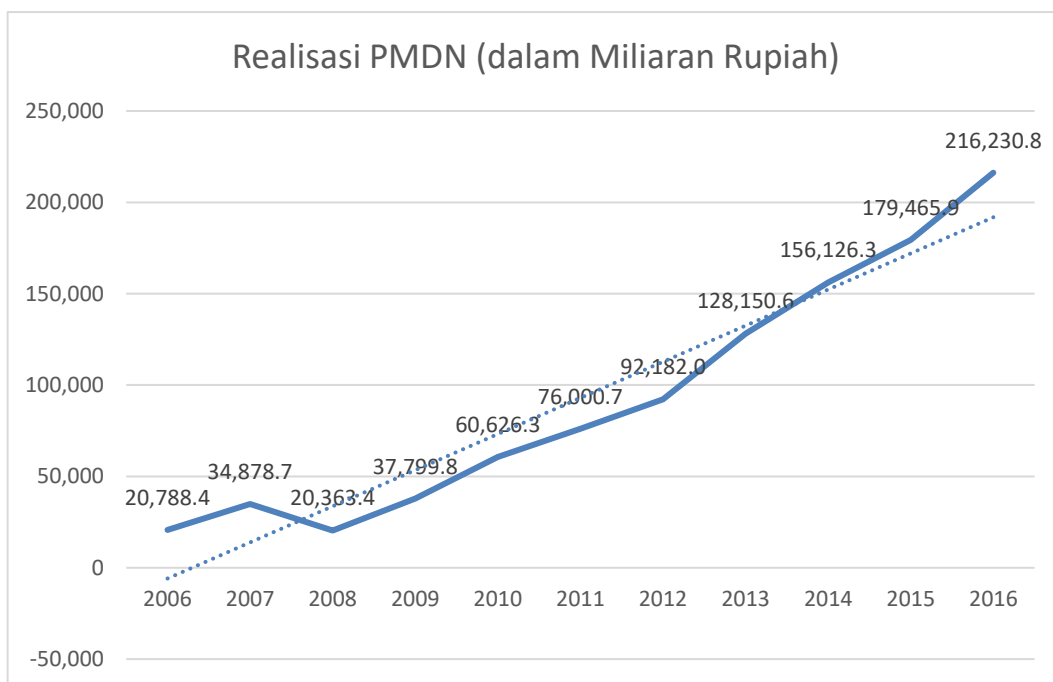


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Investasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi PDRB suatu wilayah. Dalam persamaannya, dari sisi pengeluaran, pendapatan regional bruto adalah penjumlahan dari berbagai variabel termasuk di

dalamnya adalah investasi. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang (Rustiono, 2008).

Gambar 1.6 PMDN di Indonesia Tahun 2010-2016 (dalam Miliaran Rupiah)

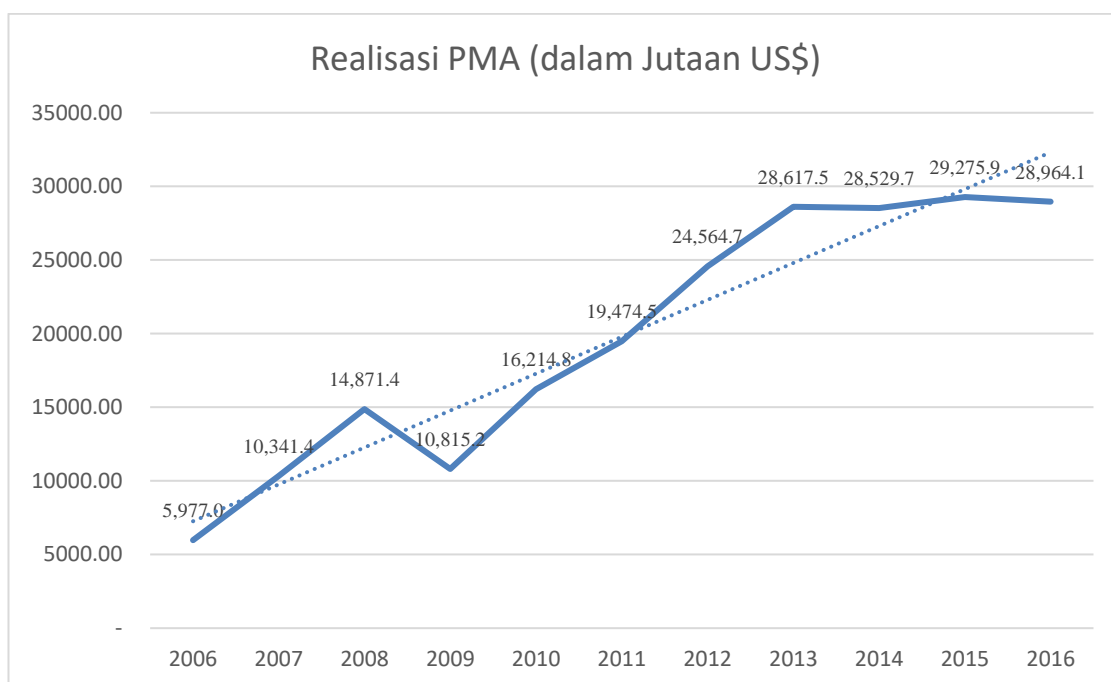


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Besaran angka realisasi penanaman modal dalam negeri di Indonesia ditunjukkan dalam Gambar 1.6. Meskipun mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya, namun penanaman modal dalam negeri Indonesia pada tahun 2006-2016 cenderung mengalami peningkatan. Di tahun 2006, PMDN di Indonesia menunjukkan angka sebesar Rp20.788.400.000.000,00. Angka tersebut kemudian mengalami kenaikan sebesar Rp14.090.300.000.000,00, yaitu menjadi sejumlah Rp34.878.700.000.000,00 pada tahun 2007. Tahun selanjutnya, angka PMDN Indonesia mengalami penurunan yang lebih besar dari angka

kenaikan yang terjadi di tahun 2007. Penurunan tersebut yakni sebanyak Rp14.515.300.000.000,00, menjadikan angka PMDN pada tahun 2008 sebesar Rp20.363.400.000.000,00. Besaran PMDN di Indonesia kemudian selalu mengalami kenaikan di tahun-tahun berikutnya, hingga pada tahun 2016 terjadi kenaikan yang jumlahnya terbesar dalam kurun waktu sebelas tahun terakhir, yaitu sebanyak Rp 36.764.930.000.000,00, di mana nilai PMDN di Indonesia pada tahun 2016 menjadi sejumlah Rp216.230.800.000.000,00.

Gambar 1.7 PMA di Indonesia Tahun 2010-2016 (dalam Jutaan US\$)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 1.7 menunjukkan nilai realisasi PMA di Indonesia pada tahun 2006-2016. Besaran PMA di Indonesia terlihat berfluktuasi dalam periode waktu tersebut. Walaupun begitu, angka PMA di Indonesia

cenderung mengalami kenaikan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2006, nilai PMA di Indonesia menunjukkan angka sebesar US\$5.977.000.000. Di tahun 2007 dan 2008, nilai tersebut mengalami kenaikan masing-masing sebesar US\$4.364.400.000 dan US\$4.530.000.000. Sehingga, PMA di Indonesia pada tahun 2008 menunjukkan nilai US\$14.871.400.000. Namun, angka tersebut kemudian menurun di tahun 2009, yakni sebesar US\$4.056.200.000. Penurunan PMA pada tahun tersebut merupakan penurunan terbesar dalam kurun waktu sebelas tahun terakhir, yaitu menjadikan nilai PMA di tahun 2009 sebesar US\$10.815.200.000. Kenaikan PMA terbesar terjadi pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2010 kenaikan PMA mencapai angka US\$5.399.600.000, sehingga PMA di tahun tersebut menjadi sebesar US\$16.214.800.000. Besaran PMA kemudian selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, yaitu sampai pada tahun 2013, di mana besaran PMA di tahun itu adalah sejumlah US\$28.617.500.000. Pada tahun 2014, terjadi penurunan nilai PMA di Indonesia sebesar US\$87.800.000. Angka tersebut kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebesar US\$746.200.000. Selanjutnya, pada tahun 2016 besaran PMA di Indonesia kembali menurun sebesar US\$311.800.000, sehingga PMA di Indonesia pada tahun tersebut menunjukkan angka sebesar US\$28.964.100.000.

Hasil estimasi spasial yang dilakukan oleh Carboni dan Detotto (2014) menunjukkan bahwa kejahatan berdampak negatif terhadap PDRB. Lebih tepatnya, kejahatan total, penipuan dan pemerasan tampaknya tidak

mempengaruhi *output* ekonomi, sementara efek pembunuhan dan perampokan secara statistik signifikan. Terdapat pula *spillover effect* yang positif antarprovinsi di Italia. Sedangkan penelitian serupa oleh Habibullah dan Baharom (2009) menyimpulkan bahwa pembunuhan, perampokan, penyerangan, pencurian siang hari, dan pencurian sepeda motor berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di Malaysia.

Dari penjabaran di atas, maka dirasa menarik untuk melakukan analisis spasial mengenai pengaruh dari berbagai tipologi kejahatan (yang terdiri dari jumlah kejahatan; kejahatan penipuan/perbuatan curang, penggelapan, dan korupsi; serta kejahatan pembunuhan); tenaga kerja; pengeluaran pemerintah daerah; angka harapan hidup; serta investasi, yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, terhadap PDRB riil per kapita di Indonesia pada tahun 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, terutama terlihat dalam Gambar 1.1 dan Gambar 1.2, sebagian besar provinsi dengan angka jumlah kejahatan yang besar memiliki nilai PDRB per kapita yang rendah. Sebaliknya, nilai PDRB per kapita yang tinggi dimiliki oleh provinsi-provinsi dengan angka jumlah kejahatan yang kecil. Terlihat pula dalam kedua gambar tersebut bahwa beberapa provinsi yang lokasinya berdekatan menunjukkan warna dengan tingkat kecerahan yang hampir sama, di mana dapat diasumsikan bahwa terdapat efek spasial dalam variabel kejahatan dan PDRB per kapita. Sehingga, analisis spasial mengenai dampak dari berbagai tipologi

kejahatan terhadap PDRB per kapita di Indonesia perlu untuk dilakukan. Selain itu, karena kejahatan bukan merupakan satu-satunya faktor yang memberikan pengaruh pada PDRB per kapita, maka perlu pula untuk dilakukan analisis faktor-faktor lain, di luar kejahatan, yang mempengaruhi PDRB per kapita pada provinsi-provinsi di Indonesia.

Oleh sebab itu, maka dapat dikemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah kejahatan terhadap PDRB per kapita di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh kejahatan penipuan/perbuatan curang, penggelapan, dan korupsi terhadap PDRB per kapita di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh kejahatan pembunuhan terhadap PDRB per kapita di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap PDRB per kapita di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap PDRB per kapita di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap PDRB per kapita di Indonesia?
7. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap PDRB per kapita di Indonesia?
8. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap PDRB per kapita di Indonesia?

9. Bagaimana pengaruh pembobotan spasial terhadap PDRB per kapita di Indonesia?
10. Bagaimana pengaruh jumlah kejahatan; kejahatan penipuan/perbuatan curang, penggelapan, dan korupsi; kejahatan pembunuhan; tenaga kerja; pengeluaran pemerintah daerah; angka harapan hidup; penanaman modal dalam negeri; penanaman modal asing; dan pembobotan spasial secara simultan terhadap PDRB per kapita di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh jumlah kejahatan terhadap PDRB per kapita di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh kejahatan penipuan/perbuatan curang, penggelapan, dan korupsi terhadap PDRB per kapita di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh kejahatan pembunuhan terhadap PDRB per kapita di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap PDRB per kapita di Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap PDRB per kapita di Indonesia.
6. Menganalisis pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap PDRB per kapita di Indonesia.

7. Menganalisis pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap PDRB per kapita di Indonesia.
8. Menganalisis pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap PDRB per kapita di Indonesia.
9. Menganalisis pengaruh pembobotan spasial terhadap PDRB per kapita di Indonesia.
10. Menganalisis pengaruh jumlah kejahatan; kejahatan penipuan/perbuatan curang, penggelapan, dan korupsi; kejahatan pembunuhan; tenaga kerja; pengeluaran pemerintah daerah; angka harapan hidup; penanaman modal dalam negeri; penanaman modal asing; dan pembobotan spasial secara simultan terhadap PDRB per kapita di Indonesia.

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan akan berguna untuk:

1. Bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Memberikan informasi dalam analisis spasial konsekuensi ekonomi akibat kejadian kejahatan di Indonesia.
3. Bahan referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya yang membahas mengenai topik yang serupa.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan dari penelitian ini terdiri dari lima bab, yakni: pendahuluan, telaah pustaka, metode penelitian, hasil dan analisis, serta penutup. Masing-masing bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, dipaparkan latar belakang dari masalah yang akan dianalisis, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari dilakukannya penelitian, serta sistematika penulisan dari penelitian.

2. BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab II berisi mengenai teori yang menjadi landasan dalam analisis dan penelitian terdahulu dari masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yakni mengenai analisis spasial konsekuensi ekonomi akibat kejadian kejahatan di Indonesia. Selain itu, kerangka pemikiran serta hipotesis juga dijabarkan dalam bab telaah pustaka.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Isi dari bab metode penelitian membahas tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian beserta definisi operasional dari masing-masing variable tersebut. Jenis dan sumber dari data yang digunakan dalam penelitian juga dijelaskan dalam bab ini. Selain itu, metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian, serta metode analisis yang digunakan akan dapat diketahui di bab tersebut.

4. BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Hasil dan analisis penelitian terdiri dari: deskripsi dari objek penelitian yang digunakan, analisis data, serta interpretasi hasil yang diperoleh dari penelitian.

5. BAB V PENUTUP

Bab V dari penulisan penelitian ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian, dan keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan. Selain itu, saran-saran, yang didapatkan dari hasil penelitian, yang diberikan juga terdapat dalam bab penutup.